

Dualism and Power Perspectives: Their Influence on the Socio-Political Attitudes of Christians

PENULIS

Agustina Sjelfrita Pangkey

INSTITUSI

Sekolah Tinggi Teologi
Bandung

E-MAIL

asyelfrita@gmail.com

HALAMAN

149-163

ABSTRACT

The issue of church involvement in the political sphere remains a significant point of debate within Indonesia's pluralistic and religious society. On one hand, the church is called to be a prophetic voice advocating for justice and truth; on the other, concerns about the contamination of worldly interests lead many to reject the idea of the church's active engagement in practical politics. This paper aims to systematically examine church members' understanding and attitudes toward politics, particularly regarding the dualism between Christian spirituality and civic responsibility. This study employs a descriptive quantitative approach, using data collected through an online survey of 518 respondents from various Evangelical church denominations across four major islands of Indonesia. The questionnaire was based on a five-point Likert scale to measure levels of political participation and the factors influencing it. The findings indicate that most respondents hold ambivalent views toward politics; while they acknowledge the importance of justice and morality in national life, they maintain a distance from practical politics due to theological and historical reasons. These findings highlight the need for contextually grounded political education rooted in public theology within church settings. In this way, the church can continue to fulfill its prophetic and ethical role without compromising its spiritual integrity within the context of the Pancasila state.

Keywords: Church, Politics, Public Theology, Engagement, Citizenship

Pemahaman Dualisme Dan Perspektif Tentang Kekuasaan Terhadap Sikap Sosial Politik Orang Kristen

Agustina Sjelfrita Pangkey

Sekolah Tinggi Teologi Bandung

asyelfrita@gmail.com

Abstrak: Isu mengenai keterlibatan gereja dalam ranah politik terus menjadi perdebatan penting di tengah masyarakat Indonesia yang plural dan religius. Di satu sisi, gereja dipanggil untuk menjadi suara kenabian yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran; di sisi lain, kekhawatiran akan kontaminasi kepentingan duniawi membuat banyak pihak menolak gagasan bahwa gereja terlibat aktif dalam politik praktis. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis pemahaman dan sikap jemaat terhadap politik, khususnya terhadap dualisme antara spiritualitas Kristen dan tanggung jawab sebagai warga negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, dengan data yang dikumpulkan melalui survei daring terhadap 518 responden dari berbagai denominasi gereja berlatar belakang Injili di empat pulau besar Indonesia. Kuesioner disusun berdasarkan skala Likert lima tingkat untuk mengukur tingkat partisipasi politik dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pandangan ambivalen terhadap politik; mereka mengakui pentingnya keadilan dan moralitas dalam kehidupan berbangsa, namun tetap menjaga jarak dari politik praktis karena alasan teologis dan historis. Temuan ini memperlihatkan perlunya pendidikan politik yang kontekstual dan berbasis teologi publik dalam lingkungan gereja. Dengan demikian, gereja dapat tetap menjalankan peran profetik dan etisnya tanpa kehilangan integritas rohaninya dalam konteks negara Pancasila.

Kata kunci: Gereja, Politik, Teologi Publik, Keterlibatan, Kewarganegaraan.

PENDAHULUAN

Pertanyaan seputar “*bolehkah gereja berpolitik?*” senantiasa menjadi perdebatan yang aktual, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk dan demokratis. Pertanyaan ini menyiratkan anggapan dasar bahwa politik dan gereja adalah dua domain yang berbeda secara esensial dan harus dijaga jaraknya. Inilah bentuk paling awal dari dualisme Kristen dalam relasi sosial-politik. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan gereja di ruang publik masih sering dipertanyakan, dan gereja belum sepenuhnya diakui sebagai aktor sosial-politik yang sah. Situasi ini mencerminkan warisan historis pemisahan antara wilayah spiritual dan sekuler yang hingga kini belum sepenuhnya diselesaikan, baik dalam dimensi teologis maupun praksis institusional gerejawi.

Ada beberapa penyebab munculnya jarak antara gereja dan politik. Di antaranya, ada kekhawatiran moral dan spiritual jika gereja masuk wilayah politik. Politik dianggap “kotor”, sementara gereja harus “kudus”. Marthen Manggeng mengatakan bahwa warga dan pemimpin gereja masih mempertahankan pandangan dualistik yang memisahkan antara yang suci dan yang sekuler sehingga dunia politik yang kotor harus dihindari.¹ Harry Blamires menyatakan

¹ Marthen Manggeng, “Teologi Politik,” in *Pendeta Di Panggung Politik* (Makassar: Yayasan Oase INTIM,

pendapatnya bahwa kekuasaan cenderung disalahgunakan, semakin mutlak kekuasaan, semakin besar pula potensi penyalahgunaannya.² Ranoh juga mengemukakan mengapa orang Kristen cenderung menjauhi dunia politik, alasannya karena politik sering kali penuh dengan intrik, intimidasi, serta permainan kekuasaan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Kekristenan.³ Akhirnya muncullah pemikiran agar gereja sebaiknya dipisahkan dari negara karena sejarah menunjukkan bahwa politik kerap diwarnai oleh penyimpangan moral, kekerasan, dan dominasi kekuasaan.⁴

Harus diakui, relasi antara gereja dan negara di Indonesia mengalami pasang surut: pada masa Orde Baru, banyak gereja memilih sikap non-konfrontatif demi menjaga stabilitas dan keberlangsungan pelayanan, sedangkan pada era Reformasi dan sesudahnya, muncul peluang sekaligus tantangan baru bagi gereja untuk mengambil peran profetis dalam menyuarakan kebenaran, keadilan, dan perdamaian. Umat Kristen memiliki hak dan tanggung jawab sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Namun, dalam prosesnya, tidak jarang keterlibatan gereja dalam politik menimbulkan resistensi—baik dari internal gereja sendiri maupun dari masyarakat luas—karena dianggap melampaui fungsi rohaninya atau bahkan terjebak dalam aroma patron-klien yang kental.

Dalam kerangka ketegangan inilah, gereja perlu secara serius merefleksikan bentuk keterlibatannya. Gereja tidak hanya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dalam ranah spiritual, tetapi juga untuk menegaskan peran kenabiannya di tengah masyarakat yang sedang bergulat dengan berbagai krisis moral dan sosial.⁵ Namun, partisipasi itu harus dijalankan dengan kehati-hatian agar gereja tidak terseret ke dalam pusaran pragmatisme politik yang berpotensi mengikis integritas spiritual dan otoritas moralnya.⁶

Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk mengkaji tingkat partisipasi politik jemaat serta mengidentifikasi faktor-faktor konseptual dan teologis yang memengaruhi keterlibatan mereka dalam ranah sosial-politik, khususnya dalam konteks relasi antara gereja dan kewarganegaraan di Indonesia. Dengan pemahaman yang utuh terhadap konteks tersebut, gereja diharapkan mampu berpartisipasi dalam politik secara relevan terhadap tantangan zaman, sekaligus tetap setia pada panggilan Injil untuk menjadi terang dan garam bagi dunia—termasuk di dalam arena politik yang sering kali kompleks dan sarat ambiguitas moral.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan objektif mengenai pemahaman dualisme jemaat mengenai politik melalui pengumpulan dan analisis data berbasis angka. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan

2013), 220–21.

² Harry Blamires, *Pemikiran Pasca-Kristen* (Surabaya: Momentum, 2002), 129.

³ Ayub Ranoh, “Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi,” in *Teologi Politik* (Makassar: Yayasan Oase INTIM, 2013), 86.

⁴ Daulat Tambunan, “Bolehkah Gereja Berpolitik?,” <https://Binus.Ac.Id/Character-Building/2021/02/Bolehkah-Gereja-Berpolitik/>, 2021. Diakses 2 Desember 2024

⁵ Lawrence Ko, *From the Desert to the City: Christians in Creation Care* (Singapore: Sower Publishing Centre, 2020), 37–38.

⁶ Tambunan, “Bolehkah Gereja Berpolitik?”

kuesioner tertutup yang disusun berdasarkan skala *Likert* lima tingkat (1–5), yang merepresentasikan tingkat persetujuan atau frekuensi terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan. Survei dalam penelitian ini dilaksanakan secara daring melalui platform *Google Form*, dengan periode pengisian kuesioner berlangsung dari tanggal 4–13 November 2024, yang melibatkan 518 responden dari beberapa denominasi gereja Tionghoa yang berlatar belakang Injili yang tersebar di 4 pulau besar di Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.

Kuesioner yang disusun terdiri atas lima bagian utama, yaitu: (1) data demografis, (2) perspektif responden tentang dualisme, (3) perspektif tentang kekuasaan, (4) pandangan terhadap politik, dan (5) bentuk partisipasi politik yang dijalankan oleh responden. Secara keseluruhan, instrumen ini memuat 20 pernyataan yang dirancang menggunakan skala *Likert* 1 hingga 5 untuk mengukur tingkat persetujuan atau frekuensi responden terhadap setiap pernyataan yang diajukan. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner dianalisis secara deskriptif menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS. Selain itu, dilakukan pula pengamatan terhadap kemungkinan adanya korelasi sederhana antar-variabel yang diteliti. Uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen menunjukkan bahwa seluruh item pengukuran yang berbasis skala *Likert* terbukti valid dan reliabel.⁷

PEMBAHASAN

Pemahaman dualisme dalam teologi Kristen tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari konstruksi historis dan teologis yang panjang serta kompleks. Dalam praktiknya, dualisme sering kali dipahami secara sempit sebagai pemisahan antara gereja dan negara, atau antara yang rohani dan yang duniawi. Cara pandang ini telah membentuk sikap banyak orang Kristen yang cenderung menarik diri dari ranah sosial-politik, dengan alasan bahwa politik adalah wilayah sekuler yang "kotor" dan tidak sesuai dengan kekudusan iman, tidak dapat dilepaskan dari akar teologis yang lebih dalam. Pemisahan ini sesungguhnya berakar dari cara pandang dualistik yang telah lama membentuk pemahaman iman sebagian umat.

Pemahaman Responden terhadap Dualisme Sakral–Sekuler

Sikap menarik diri sesungguhnya mencerminkan warisan dari pola pikir dualistik yang lebih mendalam. Banyak orang percaya masih terjebak dalam pola pikir dualisme yang secara ketat memisahkan antara yang sekuler dan rohani, sehingga menyebabkan pola hidup dualistis yang memisahkan dunia rohani dari dunia sekuler. Pandangan ini menempatkan aktivitas gerejawi, ibadah, dan pelayanan spiritual sebagai sesuatu yang lebih kudus dan mulia, sementara urusan-urusan dunia seperti politik, ekonomi, dan pekerjaan umum dianggap sebagai wilayah yang terpisah dari kekudusan iman dan kurang mulia. Dalam kerangka ini, dunia politik sering kali dipandang sebagai arena yang “kotor” dan berisiko mencemari kesalehan sehingga keterlibatan dalam politik dianggap tidak layak bagi orang percaya. Sikap gereja yang menarik diri dari dunia sering kali disebabkan oleh berkembangnya sindrom atau

⁷ Abdul Hamid and Riris Aishah Prasetyowati, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Eksperimen* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020), 62.

fobia terhadap politik.

Konsekuensinya, banyak umat Kristen memaknai spiritualitas secara sempit sebagai relasi personal dengan Tuhan yang tidak perlu diwujudkan dalam tanggung jawab sosial-politik, sehingga mengabaikan relevansi iman terhadap struktur dan ruang publik. Akibatnya, gereja cenderung menjadi komunitas yang menghindari keterlibatan dengan dunia (*world-denying church*) daripada menjadi alat Allah yang aktif berkarya di tengah dunia (*world-engaging church*).⁸ Apabila, pandangan ini menjadi dasar sikap iman, maka dampaknya akan bersifat multidimensional, tidak hanya membentuk wajah gereja yang timpang karena hanya menonjolkan aspek rohaniah atau kultus, tetapi juga melahirkan bentuk iman yang terasing dan tidak peduli terhadap realitas sosial di sekitarnya.⁹

Berikut gambaran dari responden sehubungan dengan perspektif tentang dualisme:

Crosstab antara Gender dengan Pekerjaan di luar pendeta bukan rohani

Gender	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Ragu-ragu		Setuju		Sangat Setuju	
	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%
Perempuan	55	19.16	89	31.01	29	10.10	92	32.06	22	7.67
Laki-laki	65	28.14	72	31.17	16	6.93	59	25.54	19	8.23
	120		161		45		151		41	

Berdasarkan data *crosstab*, dapat dianalisis pandangan mengenai pekerjaan di luar pendeta yang dianggap bukan pekerjaan rohani, berdasarkan jenis kelamin. Di kalangan perempuan, mayoritas tidak setuju dengan anggapan tersebut, dengan 51% yang beranggapan pekerjaan di luar pendeta bukan pekerjaan rohani, sementara 40% setuju. Sementara itu, di kalangan laki-laki, 59% juga tidak setuju dengan anggapan bahwa pekerjaan di luar pendeta bukan pekerjaan rohani, meskipun 34% setuju. Dengan demikian secara umum, baik perempuan maupun laki-laki cenderung tidak setuju dengan pandangan bahwa pekerjaan di luar pendeta bukanlah pekerjaan rohani, meskipun ada sejumlah orang yang ragu atau setuju. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak memiliki pandangan dualisme yang memisahkan pekerjaan rohani dengan tidak rohani.

Crosstab antara Pendidikan dengan Politik adalah kotor

Pendidikan	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Ragu-ragu		Setuju		Sangat Setuju	
	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%
SMA	8	7.27	44	40.00	25	22.73	25	22.73	8	7.27
Diploma	1	3.57	6	21.43	4	14.29	14	50.00	3	10.71
S1	39	13.36	105	35.96	51	17.47	73	25.00	24	8.22
S2	13	16.25	34	42.50	18	22.50	8	10.00	7	8.75
S3	1	12.50	5	62.50	0	0.00	2	25.00	0	0.00
	62		194		98		122		42	

⁸ Hendrikus Telaumbanua, "Identitas Dan Nasionalisme Komunitas Kristen Di Indonesia: Tinjauan Pemikiran Th. Sumartana Dan Implikasinya Bagi Pelayanan Kaum Muda," *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 13, no. 1 (April 2012): 1.

⁹ Saut Hamonangan Sirait, *Politik Kristen Di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), 3.

Berdasarkan data di atas, kita dapat menganalisis pandangan "politik adalah kotor" berdasarkan tingkat pendidikan. Di tingkat SMU, mayoritas responden lebih cenderung tidak setuju dengan anggapan tersebut, dengan 47% yang tidak setuju dan 30% yang setuju. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kecenderungan tidak setuju yang lebih dominan, masih banyak jumlah orang yang merasa ragu atau bahkan setuju dengan anggapan tersebut.

Pada tingkat pendidikan Diploma, pandangan mengenai politik sebagai sesuatu yang kotor lebih cenderung diterima, dengan 61% yang setuju dan 25% yang tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat Diploma, pandangan terhadap politik cenderung lebih pesimis, dengan lebih banyak orang yang setuju bahwa politik itu kotor.

Sedangkan di tingkat pendidikan S1, kita melihat bahwa 49% tidak setuju dengan anggapan ini dan 37% setuju. Meskipun mayoritas masih tidak setuju, ada sejumlah orang yang mulai meragukan atau menerima anggapan tersebut, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan pada tingkat pendidikan Diploma.

Sedangkan pada tingkat pendidikan S2, sebagian besar responden sekitar 59% tidak setuju dengan anggapan bahwa politik itu kotor dan 22% yang ragu. Persentase yang tidak setuju cukup tinggi, menandakan bahwa orang dengan pendidikan S2 lebih cenderung memiliki pandangan positif atau lebih kritis terhadap politik. Terakhir, pendidikan S3, mayoritas besar responden yaitu 75% tidak setuju dengan anggapan tersebut, sementara hanya 25% yang setuju. Persentase responden yang setuju dengan anggapan ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan responden pada tingkat pendidikan lainnya.

Dari kedua data *crosstab* tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden cenderung menolak dualisme yang memisahkan iman dan aspek duniawi, seperti pekerjaan dan politik. Responden melihat hubungan yang lebih holistik antara kehidupan rohani dan aktivitas duniawi, termasuk pekerjaan dan politik. Sehingga, mereka berpendapat bahwa pekerjaan di luar pendeta juga bisa dianggap sebagai pekerjaan rohani, juga menolak pandangan kalau politik itu kotor.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar kecenderungan untuk menolak anggapan bahwa politik itu kotor. Di kalangan individu dengan pendidikan tinggi tercermin pemahaman yang lebih dalam dan kritis terhadap dinamika politik, yang tidak selalu menganggap politik buruk atau kotor.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Siringoringo dan beberapa rekannya yang mengatakan bahwa responden dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menganalisis dan memahami isu-isu kompleks, seperti kebijakan ekonomi, politik luar negeri, dan masalah sosial. Sebaliknya, responden dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah mengakui kesulitan dalam memahami isu-isu tersebut, sering merasa bingung, atau merasa tidak memiliki cukup informasi untuk membuat keputusan yang tepat sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan memegang peran krusial dalam membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk

berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.¹⁰

Persepsi Responden terhadap Kuasa dan Kekuasaan Politik

Tidak hanya tingkat akademis tetapi juga ketiadaan pendidikan politik yang memadai membawa dampak pada kurangnya kesadaran, juga memperlemah kemampuan generasi muda untuk memahami dan memanfaatkan hak-hak politiknya secara bertanggung jawab. Dalam konteks ini, penting untuk melihat bagaimana persepsi responden—terutama generasi muda—terhadap konsep kuasa dan kekuasaan politik dapat memengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam sistem demokrasi.

Berikut gambaran dari responden sehubungan dengan keterlibatan politik generasi muda:

Crosstab antara Generasi dengan memberikan suara pada Pilkada mendatang

Generasi	tidak akan memilih		belum memutuskan		mungkin akan memilih		akan memilih	
	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%
Baby Boomers	0	0.00	6	10.17	8	13.56	45	76.27
Generasi X	11	4.70	21	8.97	25	10.68	177	75.64
Generasi Millenial	9	6.67	23	17.04	20	14.81	83	61.48
Generasi Z	5	5.56	10	11.11	30	33.33	45	50.00
	25		60		83		350	

Berdasarkan data partisipasi memberikan hak suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang berdasarkan generasi, dapat dilihat adanya perbedaan signifikan antara generasi yang lebih tua dan yang lebih muda dalam hal komitmen untuk memberikan suara. Untuk Generasi Baby Boomers, data menunjukkan bahwa hampir seluruhnya, yaitu 76,27%, telah memutuskan untuk memilih. Ini menandakan bahwa mereka memiliki tingkat partisipasi yang sangat tinggi dalam Pilkada mendatang. Angka ini mencerminkan stabilitas dan kepastian dalam memilih. Pada Generasi X, tingkat partisipasi hampir sebanding dengan Generasi Baby Boomers, dengan 75,64% yang berkomitmen untuk memberikan suara dalam Pilkada.

Kondisi berbeda terlihat pada Generasi Milenial, di mana 61,68% sudah memutuskan untuk memilih, namun ada ketidakpastian yang lebih besar dalam kelompok ini dibandingkan dengan generasi yang lebih tua. Sedangkan, pada Generasi Z, tingkat partisipasi sangat rendah dibandingkan dengan generasi lainnya, hanya 50% yang sudah memutuskan untuk memilih. Sebanyak 33,33% dari mereka masih dalam keraguan untuk memilih.¹¹

¹⁰ Agnes Chintya Siringoringo et al., “Analisis Tingkat Pendidikan Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pemilihan Umum Presiden 2024 Di Desa Ketaren Kabupaten Karo,” *Journal of Education and Learning Evaluation* 1, no. 2 (Desember 2024): 671.

¹¹ Kurnia Yunita Rahayu., “Pemilih Gen Z Dominan Di Pilkada 2024, Benarkah Mereka Buta Politik?,” <https://www.kompas.id/Baca/Polhuk/2024/07/31/Pemilih-Gen-z-Dominan-Di-Pilkada-2024-Benarkah-mereka-Buta-Politik>, July 31, 2024. Selama ini, perilaku buta politik kerap disematkan pada [generasi Z](#). Namun, generasi berusia di bawah 26 tahun yang berpotensi menjadi kelompok pemilih kedua terbesar setelah generasi Milenial dalam pemilihan kepala daerah serentak 2024 atau sama seperti [Pemilu 2024](#), Februari lalu, itu pun selalu bisa mematahkan pandangan miring tersebut. Hal ini setidaknya tampak kembali menjelang digelarnya [Pilkada 2024](#). Seusai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, [preferensi politik](#) generasi Z ([gen Z](#)) menjadi bulan-bulanan lantaran disebut merepresentasikan perilaku buta politik. Kendati demikian, tingkat partisipasi politik mereka cukup tinggi. Hasil *exit poll* Indikator Politik Indonesia pada 21 Februari 2024, misalnya, menunjukkan bahwa

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia, generasi yang lebih tua cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam Pilkada. Hal ini disebabkan oleh pengalaman dan kedewasaan politik yang dimiliki oleh mereka, yang memengaruhi kemampuan mereka dalam membuat keputusan politik yang lebih matang dan stabil. Generasi yang lebih tua biasanya lebih mantap dalam menentukan pilihan mereka, sementara generasi muda sering kali menunjukkan keraguan atau bahkan belum memutuskan pilihan mereka hingga saat-saat terakhir.

Sebagai negara demokrasi, sejatinya Indonesia telah memberi ruang partisipasi melalui pemberian hak pilih bagi setiap warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah. Hal ini menjadikan keterlibatan generasi muda sebagai salah satu elemen strategis dalam demokrasi elektoral, terutama karena mereka merupakan kelompok pemilih terbesar dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pilkada 2024. Akan tetapi, meskipun memilih adalah hak yang dijamin konstitusi, tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk tidak menggunakan hak tersebut—sering kali karena sikap apatis, ketidakpedulian, atau kekecewaan terhadap praktik politik yang ada.¹²

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis: sejauh mana kesadaran politik generasi muda berkembang di tengah kekecewaan terhadap sistem? Apakah rendahnya partisipasi mereka merupakan akibat dari buta politik,¹³ ataukah ekspresi dari ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga politik yang dianggap tidak merepresentasikan aspirasi publik? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk ditelaah, tidak hanya untuk memahami tantangan keterlibatan politik generasi muda, tetapi juga dalam rangka merumuskan strategi pembinaan politik yang lebih efektif, baik bagi kelompok minoritas maupun bagi warga negara secara umum.

Crosstab antara Pendidikan dengan memberikan suara pada Pilkada mendatang

Pendidikan	tidak akan memilih		belum memutuskan		mungkin akan memilih		akan memilih	
	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%
SMA	5	4.55	14	12.73	26	23.64	65	59.09
Diploma	1	3.57	5	17.86	5	17.86	17	60.71
S1	12	4.11	35	11.99	44	15.07	201	68.84
S2	7	8.75	5	6.25	8	10.00	60	75.00
S3	0	0.00	1	12.50	0	0.00	7	87.50
	25		60		83		350	

Berdasarkan data partisipasi memberikan hak suara dalam Pilkada mendatang berdasarkan tingkat pendidikan responden, terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat partisipasi antar kelompok pendidikan. Pada kelompok dengan pendidikan SMA, sekitar 59% responden menyatakan akan memilih, menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup tinggi. Namun, ada 24% yang masih mungkin akan memilih, meskipun belum sepenuhnya yakin. Selanjutnya, kelompok Diploma, tingkat partisipasi sedikit lebih tinggi, yaitu 61% yang

23,4 persen atau hampir seperempat dari total pemilih Pilpres 2024 berasal dari gen Z.

¹² Karman Yonky, *Kata Dan Karya* (Jakarta: Perkantas, 2017), 177.

¹³ Rahayu.

berencana untuk memilih.

Kelompok dengan pendidikan S1 menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi lagi, dengan 69% yang sudah memutuskan untuk memilih. Pada kelompok S2, sekitar 75% telah memutuskan untuk memilih, yang mencerminkan komitmen yang lebih besar untuk berpartisipasi. Terakhir, pada kelompok dengan pendidikan S3, 87% menyatakan akan memilih, angka tertinggi di antara semua kelompok pendidikan. Tidak ada responden dari kelompok ini yang menyatakan mungkin akan memilih, yang menunjukkan tingkat kepastian yang sangat tinggi dalam keputusan mereka.

Secara keseluruhan, tingkat partisipasi memberikan hak suara dalam Pilkada cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan responden. Meskipun terdapat ketidakpastian pada setiap tingkat pendidikan, tetapi semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk terlibat dalam proses pemilihan, dengan tingkat ketidakpastian yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan responden, semakin tinggi pula kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam ranah politik.

Mereka yang berpartisipasi dalam politik, menyatakan bahwa pendidikan telah memberi mereka keterampilan berpikir kritis yang sangat penting untuk mengevaluasi informasi serta argumen yang disampaikan oleh calon pemimpin dan media massa. Mereka merasa lebih percaya diri dalam berpartisipasi dalam diskusi politik dan membuat keputusan yang lebih terinformasi saat memilih. Dengan demikian, peningkatan akses pendidikan di masyarakat bukan hanya akan memperbaiki kesenjangan pemahaman politik, tetapi juga memperkuat partisipasi politik serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemilih, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kehidupan demokrasi secara keseluruhan.¹⁴

Crosstab antara Generasi dengan mendukung kampanye secara finansial atau waktu

Generasi	tidak akan mendukung		ragu-ragu mendukung		akan mendukung		akan sangat mendukung	
	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%	<i>f</i>	%
Baby Boomers	34	57.63	15	25.42	10	16.95	0	0.00
Generasi X	95	40.60	74	31.62	57	24.36	8	3.42
Generasi Millenial	54	40.00	57	42.22	24	17.78	0	0.00
Generasi Z	25	27.78	43	47.78	21	23.33	1	1.11
	208		189		112		9	

Berdasarkan data dukungan terhadap kampanye secara finansial dan waktu berdasarkan generasi, terlihat perbedaan signifikan dalam kesiapan generasi untuk mendukung kampanye. Untuk Generasi Baby Boomers, hampir 58% tidak mendukung kampanye, mencerminkan ketidaktertarikan atau ketidaksediaan untuk terlibat. Namun, 25,42% masih ragu, menunjukkan ketidakpastian dalam komitmen mereka. Lalu, Generasi X, 40,60% tidak mendukung, dan 31,62% merasa ragu. Meskipun sebagian besar tidak mendukung atau masih ragu, ada sedikit peningkatan komitmen dibandingkan dengan Generasi Baby Boomers. Generasi Milenial menunjukkan ketidakpastian yang lebih tinggi, dengan 42,22% ragu dan 40% tidak

¹⁴ Siringoringo et al., "Analisis Tingkat Pendidikan Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pemilihan Umum Presiden 2024 Di Desa Ketaren Kabupaten Karo," 671.

mendukung. Ini menunjukkan kurangnya komitmen terhadap kampanye, baik dalam segi finansial maupun waktu. Sedangkan, generasi Z juga memiliki ketidakpastian yang tinggi, dengan sebaran 27,78% tidak mendukung, 47,78% ragu, dan 23,33% berencana mendukung. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun generasi muda memiliki kesadaran untuk berpartisipasi, akan tetapi mereka enggan untuk terlibat jauh dalam politik.

Kemungkinan yang muncul mengapa generasi muda kurang berpartisipasi dalam kampanye adalah masih ada sikap negatif atau pasif terhadap peran politik dalam kehidupan orang Kristen – warisan pola pikir dualistik yang memisahkan antara kehidupan rohani dan politik – yang berakar kuat dalam kehidupan gereja dan terus memengaruhi sikap sebagian besar orang Kristen tidak terkecuali pemuda.¹⁵ Selain itu, generasi Z tidak memiliki hubungan yang riil dan akuntabel dengan para wakil yang duduk di parlemen. Setelah terpilih, wakil rakyat jarang membangun komunikasi, bahkan tidak menyampaikan laporan kinerja. Situasi ini menciptakan jarak yang makin lebar, karena pemilih tidak merasa aspirasinya diperjuangkan atau tidak mengetahui peran wakilnya di parlemen.¹⁶

Keterlibatan Sosial-Politik Responden: Antara Panggilan dan Keengganan

Dalam konteks demografi Indonesia, umat Kristen merupakan kelompok minoritas agama terbesar, sementara komunitas Tionghoa menempati posisi sebagai kelompok minoritas etnis yang paling signifikan secara historis dan sosial.¹⁷ Representasi politik dari kedua kelompok ini hanya dapat terwujud apabila negara, partai politik, dan kelompok mayoritas menyediakan ruang yang adil dan inklusif bagi keterlibatan mereka dalam ranah politik. Namun, keberhasilan representasi tersebut tidak hanya bergantung pada sistem yang tersedia, melainkan juga pada partisipasi aktif dari kelompok minoritas itu sendiri dalam kehidupan politik, khususnya di wilayah domisili mereka.¹⁸

Yeremia 29: 7 mengatakan “Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.” Ayat ini mendorong keterlibatan orang Kristen di Indonesia. Dalam keadaan yang sulit dan kondisi yang menimbulkan kecemasan besar tentang masa depan Indonesia dan kekristenan, gereja hadir memberikan kekuatan dan ketenangan melalui doa.¹⁹ Kekuasaan adalah aspek yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, memiliki daya tarik

¹⁵ Sirait, *Politik Kristen Di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis*, 247.

¹⁶ Markus Dominggus, “Partisipasi Orang Kristen Di Dalam Pemilihan Umum: Studi Kasus Jaringan Marindo Pada Pemilu 2014 Dan 2019 Di Malang Raya, Jawa Timur,” *Reformed Center For Religion and Society* 9, no. 2 (2022): 169.

¹⁷ Muhammad Imaduddin Nasution, “Demokrasi Dan Politik Minoritas Di Indonesia,” *Politica (File:///C:/Users/ASUS/Downloads/323-626-1-SM.Pdf)* 4, no. 2 (2013): 331–32. Di akses 24 Juni 2025. Minoritas Kristen di Indonesia muncul karena adanya misi dan zending yang sangat digencarkan oleh para penjelajah Eropa yang datang dengan maksud untuk menjajah Indonesia. Para penjelajah tersebut menyebarkan ajaran Kristen secara berhati-hati. Kelompok-kelompok bangsawan lokal di Indonesia, khususnya Jawa, tidak banyak mendapatkan pengaruh dari misi dan zending tersebut. Akan tetapi, kelompok-kelompok misi dan zending tersebut tetap berkembang dan memperluas sayapnya ke seluruh tanah Nusantara. Pada perkembangan selanjutnya, seiring dengan diberlakukannya politik etis di Hindia Belanda, maka umat Kristen Indonesia, baik yang pribumi, Europeanen, maupun Timur Asing, mendirikan dua partai Kristen. Keduanya adalah partai politik yang berbeda secara sektarian.

¹⁸ Nasution, 316.

¹⁹ Dominggus, “Partisipasi Orang Kristen Di Dalam Pemilihan Umum: Studi Kasus Jaringan Marindo Pada Pemilu 2014 Dan 2019 Di Malang Raya, Jawa Timur,” 170.

yang kuat dalam masyarakat dan mudah disalahgunakan,²⁰ sehingga harus dilandasi prinsip moral dan etika yang benar.²¹ Kekuasaan yang baik bukanlah sarana untuk mendominasi, melainkan untuk membangun rasa memiliki dalam komunitas. Kekuasaan yang beretika harus berakar pada penghormatan terhadap martabat manusia sebagai ciptaan Allah. Prinsip yang selaras dengan sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang adil dan beradab."²²

Gereja diharapkan berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan menjadi terang yang menerangi kehidupan politik, mengarahkan negara menuju tujuan yang benar, yang selaras dengan cita-cita proklamasi dan semangat reformasi.²³ Dalam keadaan ini, gereja memiliki peluang untuk memainkan peran yang signifikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sekalipun harus diakui partisipasi dalam politik belum berjalan baik, gereja diharapkan tidak saja memegang doktrin, tetapi juga berfungsi sebagai agen transformasi sosial yang utuh dan menyeluruh. Seperti yang dikatakan oleh Dearborn bahwa gereja bukan sekadar institusi yang memiliki misi, melainkan bagian dari misi Allah sendiri, yang diutus untuk menebus dunia.²⁴

Gereja sebagai hamba Yesus Kristus, dipanggil untuk membuka mata terhadap kebutuhan manusia dan peka terhadap pergumulan yang terjadi dalam masyarakat.²⁵ Dalam konteks ini, keterlibatan gereja dalam politik bukan sekadar partisipasi aktif dalam proses politik praktis, tetapi lebih kepada perjuangan untuk menegakkan moralitas dan keadilan sebagaimana diajarkan oleh Kristus. Dengan demikian, gereja dapat mengubah pandangan negatif terhadap politik serta menunjukkan bahwa umat Kristen memiliki tanggung jawab untuk membawa dampak positif dalam kehidupan sosial dan politik.²⁶

Gereja dan orang Kristen tidak dapat memisahkan iman dari politik, karena tindakan tersebut sama saja dengan mengabaikan dimensi iman Kristen yang seharusnya menjangkau seluruh aspek kehidupan, termasuk keterlibatan dalam dunia sosial-politik. Pemisahan yang

²⁰ Singgih, *Iman Dan Politik Dalam Era Reformasi Di Indonesia*, 2000, 177.

²¹ Charles W Colson, *Kingdoms in Conflict: An Insider's Challenging View of Politics, Power, and the Pulpit* (Morrow: Zondervan, 1987), 274, 272. Orang Kristen yang paling teguh sekalipun bisa terjerumus dalam godaan kekuasaan yang dapat menjauhkan mereka dari esensi pelayanan kepada sesama.

²² John Stott, *Isu-Isu Global: Penilaian Atas Masalah Sosial Dan Moral Kontemporer Menurut Perspektif Kristen* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2015), 566-567. John Calvin dengan tegas menyatakan bahwa ketika penguasa politik menyalahgunakan kekuasaannya, maka otoritas di bawahnya memiliki wewenang untuk menentang dan mengoreksi ketidakadilan yang terjadi. Pandangan ini mencerminkan keyakinannya bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan keadilan dan tanggung jawab moral. Jika penguasa tertinggi bertindak sewenang-wenang, maka pejabat atau institusi di bawahnya memiliki legitimasi untuk bertindak demi menjaga keseimbangan dan menegakkan keadilan dalam masyarakat (bdk. Trisno S Sutanto, *Teologi Publik Eka Darmaputera* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022), 175).

²³ Tambunan, "Bolehkah Gereja Berpolitik?" Belajar dari pengalaman masa Orde Baru menunjukkan bahwa kurangnya kepedulian orang Kristen terhadap politik pada akhirnya berdampak pada kerugian bagi kepentingan umat Kristen, sehingga di era Reformasi, keterlibatan yang lebih proaktif diharapkan dapat menjamin kepentingan umat. Namun, lebih dari sekadar menjaga kepentingan kelompok, keterlibatan ini seharusnya dilandasi oleh kesadaran bahwa iman Kristen bukan sekadar doktrin, tetapi merupakan hubungan yang hidup dengan Kristus yang tercermin dalam tanggapan terhadap berbagai permasalahan sosial, termasuk penderitaan rakyat Indonesia, (bdk. Emanuel Gerrit Singgih, *Iman Dan Politik Dalam Era Reformasi Di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), 7.)

²⁴ Mission and Public Affairs Council (Church of England), *Mission-Shaped Church* (London: Church House Publishing, 2004), 85.

²⁵ John Stott, *Gereja: Persekutuan Yang Unik* (Jakarta: Literatur Perkantas, 2022), 29.

²⁶ Singgih, *Iman Dan Politik Dalam Era Reformasi Di Indonesia*, 78.

tegas antara keduanya berisiko membuat gereja kehilangan suara kenabiannya dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan bersama, serta melemahkan kesaksian publik gereja, tetapi juga mengaburkan hakikat pelayanan dan esensi dari iman itu sendiri.²⁷ Orang Kristen tidak seharusnya memandang diri mereka sebagai konsumen rohani yang hanya datang ke gereja untuk memenuhi kebutuhan spiritual, lalu pulang tanpa keterlibatan lebih lanjut. Sebaliknya, gereja misional adalah komunitas yang membentuk, melatih, dan mendorong jemaat untuk berpartisipasi aktif dalam misi, baik secara individu maupun kelompok.²⁸

Karman menambahkan bahwa satu kelemahan dalam kehidupan keumatan adalah kurangnya kepedulian terhadap masa depan bangsa sendiri, sehingga umat Kristiani di Indonesia perlu memandang diri mereka sebagai bagian integral dari bangsa ini. Menurutnya, *aib bangsa juga aib kita, kehormatan bangsa juga kehormatan kita, baik untuk bangsa juga baik untuk kita, tetapi baik untuk kita belum tentu baik untuk bangsa*. Pernyataan ini menekankan bahwa tanggung jawab umat Kristen bukan hanya terbatas pada kepentingan pribadi atau komunitasnya, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif dalam membangun bangsa dan negara demi kebaikan bersama. Orang percaya memiliki status ganda sebagai warga Kerajaan Allah dan warga dunia, yang tidak boleh dipertentangkan.²⁹

Gereja diutus ke dalam dunia untuk menyatakan kesaksian Injil dalam berbagai bidang, termasuk sosial, politik, ekonomi, dan budaya, dengan prinsip pelayanan demi keadilan dan kesejahteraan bersama. Misalnya, warga gereja yang mendapat kepercayaan sebagai pejabat negara harus menjalankan perannya sebagai saksi Kristus dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang.³⁰ Ngelow mengusulkan bentuk keterlibatan politik yang dapat diselenggarakan di dalam gereja atau oleh gereja, dapat dilakukan melalui pendidikan politik yang dapat dijalankan dalam beberapa bentuk seperti: memasukkan pendidikan politik ke dalam kurikulum pembinaan iman, seperti pada Sekolah Minggu, Katekisasi, atau pembekalan bagi warga dan pejabat gereja. Selain itu, pendidikan politik juga dapat dilakukan secara *ad hoc*, artinya memberikan pencerahan mengenai isu-isu politik yang sedang berlangsung, seperti menjelang pemilihan kepala daerah atau kepala negara. Program khusus lainnya misalnya menyelenggarakan pelatihan 2 sampai 3 hari secara khusus bagi kelompok tertentu, seperti pemuda, perempuan, atau pejabat gereja, yang dirancang sebagai program pengembangan kepemimpinan dengan pendekatan partisipatif.³¹

²⁷ Sirait, *Politik Kristen Di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis*, 3, 40. Iman yang holistik mencakup cinta kepada Tuhan yang diwujudkan dalam mencintai kota dan negara, mendoakan serta berupaya untuk kesejahteraan mereka, serta terlibat aktif dalam mencari solusi untuk berbagai persoalan sosial yang ada. Keterlibatan ini menjadi bagian dari tanggung jawab gereja untuk membentuk individu yang tidak hanya peduli terhadap kehidupan rohani, tetapi juga terhadap kehidupan sosial dan politik di sekitarnya, guna mewujudkan kedamaian dan keadilan yang lebih luas. (bdk. Karman, *Kata Dan Karya*, 206). Interaksi iman tersebut dapat menjadi kesempatan untuk berbagi iman dan mewujudkan kasih Kristus dalam tindakan nyata, sekaligus memperkuat komitmen kita terhadap misi yang lebih besar. (bdk. Enggar Objantoro, "Religious Pluralism and Christian Responses," *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat* 2, no. 1 (January 2018): 8.)

²⁸ Timothy Keller, *Center Church* (Amerika: Zondervan Reflective, 2012), 287.

²⁹ Yonky Karman, *Kata Dan Karya* (Jakarta: Literatur Perkantas, 2017), 206.

³⁰ Zakaria J Ngelow, "Teologi Politik," in *Pedoman Pelayanan Gereja Di Bidang Politik* (Makassar: Literatur Perkantas Jawa Timur, 2013), 295–296.

³¹ Zakaria J Ngelow, "Teologi Politik," in *Beberapa Catatan Mengenai "Politik Kristen" Di Indonesia* (Makassar: Yayasan Oase INTIM, 2013), 302.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI DUALISME TERHADAP SIKAP POLITIK ORANG KRISTEN

Penelitian di atas menunjukkan bahwa sikap menjauh dari politik yang masih kuat dianut sebagian umat Kristen tidak hanya dipicu oleh persepsi negatif terhadap praktik politik yang korup, tetapi juga merupakan akibat dari warisan teologis yang dualistik. Dualisme ini memisahkan antara iman dan kehidupan publik, antara yang sakral dan sekuler, serta antara gereja dan negara. Ketiga bentuk dualisme ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling memperkuat dalam membentuk pola pikir dan sikap jemaat terhadap keterlibatan dalam kehidupan sosial-politik.

Namun demikian, hasil survei menunjukkan adanya indikasi pergeseran paradigma, terutama di kalangan generasi muda dan responden dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Banyak dari mereka yang mulai menolak pandangan bahwa politik itu "kotor", serta memiliki pemahaman yang lebih inklusif terhadap panggilan kekristenan dalam kehidupan berbangsa. Hal ini menandakan adanya potensi untuk membentuk teologi publik yang lebih kontekstual, yang mengintegrasikan iman dengan aksi sosial dan keadilan publik. Hal ini dapat terlihat dari partisipasi politik jemaat, terutama dalam bentuk memberikan suara dalam pemilu, menunjukkan tren positif yang meningkat seiring dengan usia dan tingkat pendidikan. Namun, partisipasi aktif seperti dukungan kampanye masih menghadapi tantangan besar, terutama di kalangan generasi muda yang cenderung ragu atau apatis.

Dengan kata lain, umat Kristen Indonesia masih bergumul antara keinginan untuk terlibat dan keraguan moral terhadap ranah politik. Situasi ini membutuhkan proses pembinaan dan pendidikan politik berbasis iman agar gereja dapat mengembangkan pola keterlibatan yang sehat, kritis, dan tetap menjaga integritas spiritualnya.

Implikasi Sosial-Politik bagi Jemaat Kristen Masa Kini

1. Pentingnya Pendidikan Politik Berbasis Teologi.

Gereja perlu mengintegrasikan pendidikan politik dalam program pembinaan iman, katekisasi, sekolah minggu, maupun pelatihan kepemimpinan. Tujuannya agar jemaat tidak hanya memahami politik secara praktis, tetapi juga secara teologis dan etis, sebagai bagian dari panggilan untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan umum.

2. Peneguhan Teologi Publik dan Inkarnasional.

Gereja perlu membentuk spiritualitas yang tidak terasing dari realitas sosial, tetapi justru hadir aktif di tengah dunia. Spiritualitas Kristen tidak boleh hanya bersifat vertikal (kepada Allah), melainkan juga horizontal (kepada sesama dan struktur masyarakat).

3. Penguatan Peran Gereja sebagai Agen Transformasi Sosial.

Partisipasi politik dilihat bukan sebagai pengkhianatan terhadap kekudusan, melainkan sebagai perwujudan kasih Allah bagi masyarakat. Gereja menjadi pelaku aktif yang menyuarakan nilai-nilai Injil dalam kebijakan publik, tata kelola negara, dan pemberdayaan masyarakat, tanpa terjebak dalam praktik politik partisan.

4. Pemberdayaan Generasi Muda dalam Ranah Publik.

Generasi muda merupakan kelompok strategis yang perlu dibina agar memiliki keberanian, kapasitas, dan komitmen untuk membawa perubahan. Gereja dapat menjadi ruang aman untuk melatih mereka berpikir kritis dan bertindak etis dalam dunia politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Blamires, Harry. *Pemikiran Pasca-Kristen*. Surabaya: Momentum, 2002.
- Colson, Charles W. *Kingdoms in Conflict: An Insider's Challenging View of Politics, Power, and the Pulpit*. MorrowZ: Zondervan, 1987.
- Dominggus, Markus. "Partisipasi Orang Kristen Di Dalam Pemilihan Umum: Studi Kasus Jaringan Marindo Pada Pemilu 2014 Dan 2019 Di Malang Raya, Jawa Timur." *Reformed Center For Religion and Society* 9, no. 2 (2022): 161–85.
- Hamid, Abdul, and Riris Aishah Prasetyowati. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Eksperimen*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020.
- Karman, Yonky. *Kata Dan Karya*. Jakarta: Literatur Perkantas, 2017.
- Keller, Timothy. *Center Church*. Amerika: Zondervan Reflective, 2012.
- Ko, Lawrence. *From the Desert to the City: Christians in Creation Care*. Singapore: Sower Publishing Centre, 2020.
- Manggeng, Marthen. "Teologi Politik." In *Pendeta Di Panggung Politik*. Makassar: Yayasan Oase INTIM, 2013.
- Mission and Public Affairs Council (Church of England). *Mission-Shaped Church*. London: Church House Publishing, 2004.
- Nasution, Muhammad Imaduddin. "Demokrasi Dan Politik Minoritas Di Indonesia." *Politica (File:///C:/Users/ASUS/Downloads/323-626-1-SM.Pdf)* 4, no. 2 (2013): 313–36.
- Ngelow, Zakaria J. "Teologi Politik." In *Pedoman Pelayanan Gereja Di Bidang Politik*. Makassar: Literatur Perkantas Jawa Timur, 2013.
- . "Teologi Politik." In *Beberapa Catatan Mengenai "Politik Kristen" Di Indonesia*. Makassar: Yayasan Oase INTIM, 2013.
- Objantoro, Enggar. "Religious Pluralism and Christian Responses." *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat* 2, no. 1 (January 2018): 1–9.
- Rahayu, Kurnia Yunita. "Pemilih Gen Z Dominan Di Pilkada 2024, Benarkah Mereka Buta Politik?" <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/07/31/pemilih-gen-z-dominan-di-pilkada-2024-benarkah-mereka-buta-politik>, July 31, 2024.

- Ranoh, Ayub. "Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi." In *Teologi Politik*. Makassar: Yayasan Oase INTIM, 2013.
- Singgih, Emanuel Gerrit. *Iman Dan Politik Dalam Era Reformasi Di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000.
- . *Iman Dan Politik Dalam Era Reformasi Di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000.
- Sirait, Saut Hamonangan. *Politik Kristen Di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000.
- Siringoringo, Agnes Chintya, Cindy Nababan, Dedek Harianto, Loficha Metesa Br Ginting, and Halking. "Analisis Tingkat Pendidikan Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pemilihan Umum Presiden 2024 Di Desa Ketaren Kabupaten Karo." *Journal of Education and Learning Evaluation* 1, no. 2 (Desember 2024): 668–73.
- Stott, John. *Gereja: Persekutuan Yang Unik*. Jakarta: Literatur Perkantas, 2022.
- . *Isu-Isu Global: Penilaian Atas Masalah Sosial Dan Moral Kontemporer Menurut Perspektif Kristen*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2015.
- Sutanto, Trisno S. *Teologi Publik Eka Darmaputera*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022.
- Tambunan, Daulat. "Bolehkah Gereja Berpolitik?" <https://Binus.Ac.Id/Character-Building/2021/02/Bolehkah-Gereja-Berpolitik/>, 2021.
- Telaumbanua, Hendrikus. "Identitas Dan Nasionalisme Komunitas Kristen Di Indonesia: Tinjauan Pemikiran Th. Sumartana Dan Implikasinya Bagi Pelayanan Kaum Muda." *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 13, no. 1 (April 2012): 79–98.
- Yonky, Karman. *Kata Dan Karya*. Jakarta: Perkantas, 2017.